KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng
Tanggal : Selasa, 14 Desember 2021
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 9

DPR Desak Pemerintah Turunkan Harga Minyak Goreng

JAKARTA - Harga minyak goreng terus saja melambung tinggi melampaui harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah ditetapkan Rp11.000 per liter/0,8 kilogram (kg). Harga minyak goreng hingga kemarin tercatat antara Rp17.000-Rp22.000 per kg.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi kenaikan harga minyak goreng yang sangat drastis ini. Menurutnya, kenaikan harga minyak goreng menambah beban rakyat, khususnya kalangan bawah.

"Harga minyak goreng yang melambung tinggi membu-tuhkan intervensi pemerintah agar dapat menekan atau mengendalikan kenaikan harganya," kata Puan di Jakarta kemarin.

Kenaikan harga minyak goreng yang luar biasa disebabkan masih tingginya harga minyak sawit mentah (*crude palm oil* /CPO). Puan mengatakan, pemerintah agar mencarikan solusi antarpemangku kebijakan agar persoalan ini dapat diatasi.

"Harga minyak goreng yang terus-menerus naik ini bukan baru-baru saja terjadi. Tapi, saat ini kenaikan harga minyak goreng di pasaran mencapai hampir dua kali lipat. Rakyat merasa terbebani, dan perlu upaya untuk menstabilkan harga di pasar oleh kementerian terkait," ucapnya.

Menurut Puan, saat ini perekonomian masyarakat masih belum sepenuhnya membaik akibat pandemi Covid-19. Padahal, minyak goreng adalah satu di antara kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat. "Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, yang hidupnya pas-pasan, kondisi ini sangatlah berat," lanjut Puan.

Puan meminta pemerintah berkomitmen menegakkan aturan mengenai HET minyak goreng. Dalam aturan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag), HET minyak goreng kemasan sederhana seharga Rp11.000 per liter/0,8 kg, sedangkan di pasaran saat ini harga minyak goreng jauh melampaui HET.

Mantan Menko PMK ini memahami tingginya harga CPO merupakan permasalahan nyata. Puan pun meminta pemerintah dan pelaku usaha duduk bersama untuk mencari solusi mengingat ada kewajiban *domestic market obligation* (DMO) untuk melakukan stabilisasi harga minyak goreng.

Puan juga menyebut kenaikan harga minyak goreng berdampak pada pelaku UMKM. Ia pun khawatir jika tidak ada solusi dari kenaikan harga minyak goreng, akan berdampak terhadap kesehatan masyarakat.

"Dikhawatirkan, masyarakat menggunakan minyak goreng berulang atau yang sudah tidak layak untuk menyiasati mahalnya harga minyak. Tentunya ini sangat tidak baik bagi kesehatan masyarakat, terutama di masa pandemi," ungkap Puan.

Puan mengharapkan pemerintah segera mengatasi persoalan harga minyak goreng yang tinggi. Menurutnya, memberikan alasan penyebab kenaikan harga saja tidak cukup, tetapi juga harus ada solusi sehingga kenaikan harga minyak goreng tidak terus berlanjut.

Kenaikan harga minyak goreng ini tidak saja memberatkan masyarakat berpenghasilan rendah, namun juga sebagai salah satu pemicu terjadi inflasi pada 2021. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat minyak goreng menyumbang inflasi sebesar 0,08% di November lalu, diikuti telur ayam ras dan cabai merah 0,06% dan daging ayam ras 0,02%.

Pemerintah memastikan harga minyak goreng masih tetap tinggi hingga tahun depan. Hal itu disebabkan, harga CPO sebagai bahan baku terus melonjak. "Saya pastikan sampai akhir kuartal I/2022 kenaikan harga CPO masih terjadi. Trennya masih terus begitu sehingga kemungkinan (harga minyak goreng mahal) masih terjadi," ucap Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Oke Nurwan saat konferensi pers virtual, Jumat (10/12).

Menurutnya, saat ini harga CPO mencapai USD1.350 per ton atau naik 27,17% sejak awal 2021. Pihaknya membutuhkan kajian ulang untuk menentukan harga acuan minyak goreng curah dan kemasan.

Sebagai intervensi pasar, kata Oke, pihaknya menggelontorkan 11 juta liter minyak goreng kemasan sederhana yang dibanderol Rp14.000 per liter. Hal ini untuk mengantisipasi pemenuhan kebutuhan di Natal dan Tahun Baru. "Sampai saat ini realisasinya sudah 2,3 juta liter atau sekitar 20,9 persen. Ini sudah didistribusikan ke 18 provinsi dan kami akan percepat hal itu," katanya. ■ *michelle natalia/athikaraihma*